

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya alam dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi suatu Negara dan penduduknya, oleh karena itu Negara harus mengelola dengan bijaksana sehingga dapat di manfaatkan untuk kepentingan penduduknya. Berdasarkan jenisnya sumber daya alam di bagi menjadi dua jenis yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati, sumber daya alam hayati terdiri dari nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya membentuk ekosistem.<sup>1</sup>

Indonesia dengan kekayaan alamnya memiliki sumber daya alam hayati yang beranekaragam, seperti di ketahui keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia mempunyai keunggulan Komparatif yang hanya bisa di tandingi oleh Brazil dan Zaire (Afrika), dan pada kenyataannya kira-kira 10% dari semua jenis makhluk yang hidup dan menghuni ini terdapat di Indonesia.<sup>2</sup> Hal inilah yang menjadi aset paling membanggakan bagi Indonesia, karena keberadaannya menjadi salah satu daya tarik dan menjadi sebuah identitas dari suatu Negara. Dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi tersebut maka Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan memelihara seluruh sumber

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>2</sup> Saifullah, 2007. *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang. Penerbit UIN Malang. Hal 35

daya alamnya, sehingga dapat di manfaatkan dengan cara sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dari berbagai sumber daya alam hayati tersebut yang menjadi ciri keunikan dari Indonesia adalah keanekaragaman satwanya, terdapat berbagai macam hewan atau satwa di indonesia, yang bisa kita lihat dari jumlah *Spesies* satwa liar yang di perkirakan sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu jenis) atau sekitar 17% satwa yang ada di dunia terdapat di Indonesia, meskipun luas indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Tetapi Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. *Spesies* ikan sebanyak 45% di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi tempat bagi satwa yang endemik atau satwa yang hanya terdapat di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis. Adanya satwa endemik di Indonesia sangat penting, karena jika di negara ini populasinya punah maka di dunia juga akan punah.<sup>3</sup>

Dengan keanekaragaman satwa yang cukup tinggi tersebut maka Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memelihara dan melindungi satwa-satwa tersebut agar tidak punah, akan tetapi kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya menjadikan kekayaan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia semakin lama semakin hilang dan habis termasuk salah satunya satwa-satwa yang ada di Indonesia yang semakin lama semakin punah. Pada kenyataan yang terjadi saat ini beberapa jenis satwa yang

---

<sup>3</sup> Sulistyio Budi Prabowo, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Di Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Negeri Sunan Kalijaga. di akses 3 November 2019

ada di Indonesia semakin menurun drastis di setiap tahunnya, bahkan terdapat beberapa jenis satwa yang saat ini sudah sangat sulit di temukan. Sehingga satwa-satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan di lindungi oleh Pemerintah.<sup>4</sup> Penyebab terancam punahnya satwa yang di lindungi di Indonesia setidaknya terdapat dua hal yang salah satunya perburuan satwa yang di lindungi untuk diperdagangkan secara ilegal.

Yang di maksud dengan Perdagangan satwa yang di lindungi adalah suatu perbuatan jahat terhadap satwa yang di lindungi tanpa memperdulikan peraturan yang telah ada.<sup>5</sup> Seorang pedagang satwa yang di lindungi tersebut rela melakukan segala cara seperti melakukan perburuan liar yang kemudian sebagian besar akan di perjual belikan dengan kondisi satwa yang masih hidup. Karena perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa-satwa yang di lindungi, karena satwa yang di lindungi merupakan satwa yang populasinya sudah mulai jarang di temukan.

Untuk memelihara dan melindungi satwa-satwa tersebut agar tidak punah, maka dari itu pemerintah telah melakukan langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan terhadap satwa-satwa yang ada di Indonesia. Yang mana pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan untuk melindungi satwa yang di lindungi dari berbagai macam perbuatan jahat yang dapat menimbulkan

---

<sup>4</sup> Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>5</sup> Sulistyo Budi Prabowo, *Op.cit* hal 3

kepunahan. Hal tersebut di tandai dengan di terbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati sudah secara jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Suatu tindakan dikatakan termasuk dalam kategori perdagangan ilegal yang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati digunakan istilah memperniagakan yang apabila dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sama halnya dengan memperdagangkan, memperjualbelikan, yang jika di artikan adalah menjual atau membeli sesuatu.<sup>6</sup> Perdagangan satwa dilindungi ialah suatu perbuatan pidana yang memiliki sanksi pidana dan denda yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Hayati. Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Hayati, berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 3 November 2019

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>7</sup>

Supaya larangan-larangan yang di atur dalam Pasal 21 ayat (2) tentang Konservasi Hayati, tersebut ditati oleh semua masyarakat, maka perlu ada sanksi terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2). Maka pada Pasal 40 ayat (2) dan (4) mengatur mengenai sanksi pidana untuk melindungi jenis-jenis satwa yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

- Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>8</sup>

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur hal ini, akan tetapi perniagaan satwa yang dilindungi di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini tentu menjadi ancaman yang serius terhadap kelestarian satwa-satwa yang di lindungi Indonesia. Keuntungan yang tinggi yang di dapatkan berbanding terbalik dengan kecilnya resiko hukuman yang harus di hadapi sehingga perniagaan satwa yang dilindungi ini menjadi daya tarik bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut.

---

<sup>7</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di akses pada 21 Desember 2019

<sup>8</sup> Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di akses pada 21 Desember 2019

Berdasarkan *International Enforcement Agency (IEA)*, perdagangan satwa yang dilindungi di dunia menempati posisi tertinggi ke 4 (empat) setelah narkoba, senjata api, dan perdagangan gelap manusia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, akibat perdagangan satwa secara ilegal nilai kerugian negara diperkirakan mencapai 13 triliun Rupiah per tahun. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi dalam catatan pada Akhir 2018 masih menemukan tingginya angka kasus perdagangan satwa. Data yang diperoleh dari WCS-IP terdapat kenaikan kasus perdagangan satwa dari 106 kasus di 2015, menjadi 225 kasus di 2017. Sementara pantauan hingga Oktober 2018, tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu 169 kasus.<sup>9</sup>

Perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir telah menjadi isu nasional yang sering dibicarakan di berbagai forum ilmiah, kebijakan dan media. Perdagangan satwa yang dilindungi banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia salah satunya di Kota Malang, kasus perdagangan satwa yang dilindungi beberapa kali terjadi di Kota Malang. Berikut ini beberapa kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di Kota Malang :

Dimana pada 28 November 2018, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur berhasil menyita dua ekor Lutung Jawa dari seorang penumpang bus di Terminal Arjosari, Kota Malang. menurut Nandang Pribadi, selaku Kepala BKSDA Jawa Timur Lutung Jawa tersebut dibawa tersangka

---

<sup>9</sup> Septian Reza, Jalan Panjang Berantas Penyeludupan Satwa yang Dilindungi <https://www.mongabay.co.id/> di Akses pada 3 November 2019

berinisial PRD, seorang warga Malang. Tersangka juga menawarkan melalui media sosial, yang kemudian berhasil diidentifikasi oleh petugas.<sup>10</sup>

Kemudian pada tanggal 18 April 2019, Anggota Satreskrim Polres Malang Kota menggagalkan pengiriman 2 ekor burung yang dilindungi saat akan dibawa menuju Stasiun Malang Kota. Menurut Kepala BKSDA Jawa Timur, Nandang Prihadi mengatakan, dua ekor burung itu terdiri dari burung kakatua jambul orange dan molucan. Keduanya merupakan jenis burung yang dilindungi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku dua burung itu diambil dari rumah seseorang di Malang untuk dibawa ke Bandung karena sudah terjalin transaksi perdagangan secara online.<sup>11</sup>

Kasus perdagangan satwa yang terjadi di Kota Malang tersebut merupakan perdagangan satwa yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Di dalam Peraturan Menteri tersebut terdapat 921 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh negara. Dari kasus di atas menandakan, bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi belum berjalan secara maksimal, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam

---

<sup>10</sup> Sasongko Darmadi, BKSDA Jatim sita lutung jawa dari penumpang bus di kota malang <https://www.merdeka.com> di akses pada 1 Desember 2019

<sup>11</sup> Andi Hartik Polisi Gagalkan Perdagangan 2 Ekor Kakatua Dalam Paralon dari Malang ke Bandung <https://regional.kompas.com/> di akses pada tanggal 1 Desember 2019

melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang di lindungi di Kota Malang. maka dari itu penelitian ini berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DI LINDUNGI DI KOTA MALANG”

### **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh Kepolisian Resor Kota Malang ?
2. Apa faktor penghambat dalam melakukan peyidikan terhadap perdagangan satwa yang di lindungi oleh Kepolisian Resor Kota Malang ?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang di lindungi di Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diinginkan penulis melalui penelitian ini adalah :

1. Dapat berguna untuk menambah pengetahuan, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman



ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang di lindungi.

2. Dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang di lindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum tentang pentingnya menjaga dan melindungi satwa-satwa demi mempertahankan keanekaragaman hayati di Indonesia, dan dapat memberikan pengetahuan tentang jenis-jenis satwa yang di lindungi menurut Peraturan Menteri Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa yang di lindungi di Kota Malang serta apa saja faktor-faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukumnya. Yang juga bisa menjadi masukan pada Pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi yang ada di Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis yakni sesuai dengan cara tertentu; sistematis ialah

berlandaskan pada sistem, sedangkan konsisten berarti tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>12</sup>

Sedangkan penelitian hukum dilakukan untuk mencari penyelesaian atas masalah hukum yang muncul, dengan hasil yang dicapai yakni untuk memberikan gambaran mengenai apa yang seharusnya diajukan atas masalah yang ada.<sup>13</sup>

Agar data dari suatu penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perlu adanya ketepatan dalam memilih metode penelitian supaya sesuai dan mengenai pada masalah yang menjadi obyek penelitian. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, dapat diartikan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kenyataan dalam masyarakat atau lingkungannya dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian dilakukan identifikasi untuk menuju pada penyelesaian masalah.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi di Kota Malang.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Hal. 42.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 41.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Kota Malang (Polisi Resort Kota Malang). Terpilihnya Malang dikarenakan banyak sekali perdagangan satwa yang di lindungi di Kota Malang. Malang juga merupakan tempat transit perdagangan satwa ilegal di Indonesia, satwa yang di lindungi di masukkan dari Sulawesi, Maluku, dan Papua menuju ke Malang, dari Malang baru kemudian di edarkan ke Jakarta atau Sulawesi.<sup>14</sup>

## 3. Jenis Sumber Data

Pada sebuah penelitian terdapat dua macam data yaitu: data yang diperoleh langsung di lokasi tempat penelitian dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer, dan data yang kedua dinamakan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama, yaitu perbuatan nyata suatu masyarakat yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, merupakan data atau kenyataan yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian di lapangan termasuk keterangan dari narasumber yang berhubungan dengan obyek penelitian Adapun yang termasuk dalam data primer dalam penelitian

---

<sup>14</sup> Tabloid Jawa Timur, *Malang Pintu Masuk Perdagangan Satwa Liar* <http://tabloidjawatimur.com/> di akses 15 November 2019

ini adalah hasil wawancara yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Malang.

- b. Sumber data sekunder, merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari tempat penelitian, atau informasi yang tidak diperoleh secara langsung tetapi didapat melalui studi pustaka, bukubuku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.
- c. Data Tersier, merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang penting dalam melakukan penelitian. Dalam pengumpulan data harus mendapat pengelolaan yang cermat agar data yang di dapat dari hasil penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, dan harus bisa memberikan kesesuaian pada hasil.<sup>15</sup>

Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni, sebagai berikut:

##### **a. Wawancara Langsung**

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan

---

<sup>15</sup> Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 65

masalah yang diteliti kepada seorang responden. Wawancara dilakukan dengan situasi formal maupun informal. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni, dengan petugas di Kepolisian Resort Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber tertulis yang didapat langsung dari lokasi penelitian dilaksanakan, dokumen dapat berupa foto, atau berupa informasi maupun data-data yang terkait dengan permasalahan dari Kepolisian Resort Kota Malang.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mempelajari data dan mengkaji atas keseluruhan isi pustaka serta mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah, bukubuku literatur, surat kabar/koran, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

## **5. Teknik Analisa Data**

Data yang didapatkan dan dikumpulkan dari hasil penelitian baik dalam bentuk data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni analisis data yang menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan

gambaran secara jelas dan konkrit mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi Di Kota Malang.

## **6. Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini terdiri dalam 4 (empat) bab dan terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yakni latar belakang yang memuat uraian tentang suatu masalah yang akan di kaji lebih mendalam. Rumusan masalah yang memaparkan permasalahan yang akan diangkat dan dibahas. Kemudian tujuan penulisan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, serta metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah dalam penyusunan penulisan hukum ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi penjabaran tentang teori-teori yang digunakan atau yang mendasari dari penulisan hukum. Pada bab ini memaparkan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Di Kota Malang.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini memaparkan hasil dari penelitian serta menganalisis hasil penelitian dengan menghubungkan teori-teori yang telah

dicantumkan dalam bab sebelumnya dengan hasil yang di peroleh di lokasi penelitian. Serta menjawab rumusan masalah, pertama Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Kepolisian Resort Kota Malang. Kedua terkait faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang di lindungi di Kepolisian Resort Kota Malang.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab penutup yang menjadi sub bab yakni kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisikan inti dari hasil pembahasan yang didapatkan dalam penulisan ini. Sedangkan saran berisikan rekomendasi dari penulis atas beberapa permasalahan yang diangkat.

